

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023**

Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi
Pertanian
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



Jl. Tentara Pelajar No 1A , Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Bogor

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian adalah salah satu entitas di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 31 Desember 2023

Kepala,



Dr. Asmarhansyah
NIP. 197102241998031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Tanah

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.5.5. Belanja Bantuan Sosial

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

C.1.5. Bagian lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

C.1.7. Penyisihan Piutang tidak Tertagih

C.1.8. Beban dibayar di Muka

C.1.9. Pendapatan yang masih harus diterima

C.1.10. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- C.4. Aset Lainnya
 - C.4.1. Aset Tak Berwujud
 - C.4.2. Aset Lain-lain
 - C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
- C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5.1. Uang Muka dari KPPN
 - C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5.3. Utang yang Belum Ditagihkan
 - C.5.4. Pendapatan Diterima di Muka
 - C.5.5. Beban yang Masih Harus Dibayar
- C.6. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Barang Untuk diserahkan ke Masyarakat
 - D.8. Beban Bantuan Sosial
 - D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.10. Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih
 - D.11. Kegiatan Non Operasional
 - D.12. Pos Luar Biasa
- E.. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset
 - E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan
 - E.4.3. Selisih Revaluasi Aset
 - E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
 - E.4.5. Koreksi Lain-lain
 - E.5. Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL) Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
 - E.6. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN**
JL. Tentara Pelajar No 1A Cimanggu, Kota Bogor
TELEPON 0251 8312760, FAXIMILE 02518323909

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2023
Kepala,

Dr. Asmarhansyah
NIP 19710224 199803 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp77.558.776 atau mencapai 298 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 26.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp6.369.982.613 atau mencapai 89.49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.119.615.000

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp10.166.001.010 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar 1.505.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp10.149.951.819; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp14.544.191.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp10.166.001.010.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.021.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp7.135.653.371 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp-7.118.632.371. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp5.180.000 dan sebesar Rp60.537.776 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7.058.094.595.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp10.844.163.400 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-7.058.094.595 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp87.508.368 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.292.423.837 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp10.166.001.010.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Des 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1	0	0	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	26.000.000	77.558.776	298	16.982.658
Jumlah Pendapatan		26.000.000	77.558.776	298	16.982.658
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	2.486.615.000	2.475.946.120	99.57	3.728.466.946
Belanja Barang	B.4.	4.633.000.000	3.894.036.493	84.04	3.636.166.117
Belanja Modal	B.5.	0	0	0	0
Jumlah Belanja		7.119.615.000	6.369.982.613	89.47	7.551.783.063

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	0	0
Persediaan	C.1.3	1.505.000	0
Jumlah Aset Lancar		1.505.000	0
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	18.143.458.252	18.268.457.252
Gedung dan Bangunan	C.2.2.	10.588.957.500	10.588.957.500
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3.	152.320.500	152.320.500
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	348.902.500	348.902.500
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-19.083.686.933	-18.531.727.580
Jumlah Aset Tetap		10.149.951.819	10.826.910.172
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	129.675.000	129.675.000
Aset Lain-lain	C.3.2.	2.294.747.749	2.169.748.749
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-2.409.182.664	-2.282.170.521
Jumlah Aset Lainnya		14.544.191	17.253.228
Jumlah Aset		10.166.001.010	10.844.163.400
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada pihak Ketiga	C.4.1.	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.4.3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.5.1	10.166.001.010	10.844.163.400
Jumlah Ekuitas		10.166.001.010	10.844.163.400
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		10.166.001.010	10.844.163.400

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	17.021.000	14.033.500
JUMLAH PENDAPATAN		17.021.000	14.033.500
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2.	2.475.946.120	3.728.466.946
Beban Persediaan	D.3.	141.915.900	198.758.863
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.376.320.529	2.218.034.292
Beban Pemeliharaan	D.5.	683.028.231	669.804.591
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	691.266.833	549.568.371
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	767.175.758	979.497.919
JUMLAH BEBAN		7.135.653.371	8.344.130.982
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-7.118.632.371	-8.330.097.482
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	55.357.776	-5.479.720
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10		5.479.720
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	5.180.000	2.949.158
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	5.180.000	2.949.158
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		60.537.776	-2.530.562
SURPLUS/DEFISIT - LO		-7.058.094.595	-8.332.628.044

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	10.844.163.400	11.636.511.319
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-7.058.094.595	-8.332.628.044
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	87.508.368	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	6.292.423.837	7.534.800.405
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-678.162.390	-797.827.639
EKUITAS AKHIR	E.6.	10.166.001.010	10.838.683.680

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan/Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No 1A Cimanggu Bogor.

Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mengalami perubahan nama menjadi Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian yang selanjutnya disebut BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Tugas dan Fungsi Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian :

Tugas : Melaksanakan Pengujian Standar Instrument Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pengujian standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.
- c. Pengelolaan produk instrument hasil standardisasi.
- d. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar.
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi.

Pertanian Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Panjang

Jangka

d.Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e.Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Kantor Akuntansi Bogor memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.400.000.000. Selama tahun 2022, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Akuntansi yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	26.000.000	26.000.000
Jumlah Pendapatan	26.000.000	26.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	2.951.906.000	2.486.615.000
Belanja Barang	3.528.264.000	4.633.000.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	6.480.170.000	7.119.615.000

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp77.558.776

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp77.558.776 atau mencapai 298 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp26.000.000. Pendapatan Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terdiri dari Pendapatan dari Sewa alat instrumen lapang, Mess dan Pelepasan aset non lancar dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Penggunaan sarana dan Prasarana	11.000.000	7.950.000	72.27
Pendapatan Layanan jasa Instrumen Peralatan Lapang	10.000.000	4.250.000	42.50
Pendapatan Lain-lain	5.000.000	65.358.776	1307
Jumlah	26.000.000	77.558.776	298.30

Realisasi Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 78.10 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya pelepasan aset senilai Rp.55.357.776 yang diperoleh dari hasil penjualan 1 unit kendaraan roda 4 , 2 unit kendaraan roda 2 dan peralatan mesin. Kenaikan dari sewa mess, sewa bangunan kantin.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Pendapatan Penggunaan sarana dan Prasarana	7.950.000	3.350.000	57.86
Pendapatan Layanan jasa Instrumen Peralatan Lapang	4.250.000	7.500.000	-76.47
Pendapatan Lain-lain	65.358.776	6.132.658	90.62
Jumlah	77.558.776	16.982.658	78.10

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Rp 6.369.982.613

Realisasi Belanja Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian pada TA 2023 Anggaran belanja sebesar Rp. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.486.615.000	2.475.946.120	99.57
Belanja Barang	4.633.000.000	3.894.036.493	84.04
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	7.119.615.000	6.369.982.613	89.47
Pengembalian Belanja Pegawai	0	361.613	0
Pengembalian Belanja Barang	0	930.000	0
Jumlah	7.119.615.000	6.371.274.226	89.49

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar -18.55 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kegiatan belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal karena sebagian anggaran masih di blokir
2. Tidak ada belanja modal

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Pegawai	2.475.946.120	3.728.466.946	-50.59
Belanja Barang	3.894.036.493	3.636.166.117	6.62
Belanja Modal	0	187.150.000	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	6.369.982.613	7.551.783.063	-18.55

Belanja Pegawai
Rp2.475.946.120

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.475.946.120 dan Rp 3.728.466.946 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -47,86 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya 12 pegawai PNS yang beralih ke BRIN.
2. Adanya 1 pegawai yang pensiun

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.439.635.733	3.661.223.177	-50.07
Belanja Lembur	36.672.000	67.429.000	-83.87
Jumlah Belanja Kotor	2.476.307.733	3.661.223.177	-47.85
Pengembalian Belanja Pegawai	361.613	185.231	48.78
Jumlah Belanja	2.475.946.120	3.661.037.946	-47.86

Belanja Barang
Rp3.894.966.493

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.894.966.493 dan Rp 3.636.166.117 Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 6.62 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Peningkatan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama.
2. Peningkatan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan untuk memperbaiki fasilitas kantor.
3. Peningkatan Belanja Jasa langganan listrik dan air yang disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan,
4. Peningkatan Belanja Jasa Profesi untuk mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan Balai.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.669.462.200	1.642.162.230	1.64
Belanja Barang Non Operasional	255.778.640	162.352.300	36.53
Belanja Persediaan	143.420.900	205.555.963	-43.32
Belanja Jasa	451.079.689	413.519.762	8.33
Belanja Pemeliharaan	683.028.231	663.007.491	2.93
Belanja Perjalanan Dinas	692.196.833	549.568.371	20.61
Jumlah Belanja Kotor	3.894.966.493	3.636.166.117	6.64
Pengembalian Belanja Barang	930.000	0	100
Jumlah Belanja	3.894.036.493	3.636.166.117	6.62

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp187.150.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan TA 2022 disebabkan karena tahun ini tidak ada pagu belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	187.150.000	-100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	187.150.000	-100
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	0	187.150.000	-100

Belanja
Tanah Rp0

Modal

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Karena tidak ada anggaran belanja modal tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja
Peralatan
Mesin Rp0

Modal
dan

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp0, mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp187.150.000. Hal ini disebabkan karena Tidak ada pagu belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	187.150.000	-100
Jumlah Belanja Kotor	0	187.150.000	-100
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	0	187.150.000	-100

Belanja
Gedung
Bangunan Rp0

Modal
dan

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini di sebabkan karena tidak ada anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Renovasi Gedung Kantor	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.5.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp1.505.000

Jumlah Aset Lancar Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.505.000 dan Rp. 0. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan(UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Bank BNI No. Rek.9890596486941000	0	0
Uang Muka di PUM	0	0
Jumlah	0	0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Jumlah	0	0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp.0 Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak NIHL

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) NIHL

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Tabel Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	NIHL		
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran NIHL

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	NIHIL		
	Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
NIHIL

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitor.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut

Tabel
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0	0

Beban Dibayar di Muka
NIHIL

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
NIHIL		
Jumlah	0	0

*Pendapatan yang
 Masih Harus
 Diterima NIHIL*

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut

Tabel
*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
 TA 2023 dan 2022*
(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
NIHIL		
Jumlah	0	0

*Persediaan
 Rp1.505.000*

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1.505.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	1.505.000	0
Barang untuk Pemereliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	1.505.000	0

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp10.149.951.819

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.149.951.819 dan Rp10.826.910.172.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp0

C.2.1. Tanah

Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tidak memiliki tanah.

Peralatan dan

Mesin

Rp18.143.458.252

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 18.143.458.252

Rp 18.268.457.252

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Januari 2023	18.143.458.252
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	0
Penghentian aset dari penggunaan	0
Saldo Per 31 Desember 2023	18.143.458.252
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	17.353.380.429
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	790.077.823

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp10.588.957.500

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.588.957.500 dan Rp10.588.957.500 Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Januari 2023	10.588.957.500
Mutasi tambah:	0
Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	0
Saldo Per 31 Desember 2023	10.588.957.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	1.697.038.777
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	8.891.918.723

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp152.320.500

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp152.320.500 dan Rp152.320.500 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Januari 2023	152.320.500
Mutasi tambah:	0
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Mutasi Kurang:	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo Per 31 Desember 2023	152.320.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	33.267.727
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	119.052.773

Aset Tetap Lainnya
Rp348.902.500

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp348.902.500 dan Rp348.902.500 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Januari 2023	348.902.500
Mutasi tambah:	0
-	-
Mutasi Kurang:	0
-	-
Saldo Per 31 Desember 2023	348.902.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	348.902.500

Konstruksi Dalam
Pengerjaan NIHIL

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp-19.083.686.933

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-19.083.686.933 dan Rp.-18.531.727.580 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	18.143.458.252	17.353.380.429	790.077.823
2.	Gedung dan Bangunan	10.588.957.500	1.697.038.777	8.891.918.723
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	152.320.500	33.267.727	119.052.773
4.	Aset Tetap Lainnya	348.902.500	0	348.902.500
	Jumlah	29.233.638.752	19.083.686.933	10.149.951.819

<i>Piutang Jangka Panjang Rp0</i>	<p>C.3. Piutang Jangka Panjang</p> <p>Piutang Jangka Panjang Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.</p>
<i>Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0</i>	<p>C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)</p> <p>Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.</p>
<i>Tagihan Penjualan Angsuran Rp0</i>	<p>C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran</p> <p>Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.</p>
<i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0</i>	<p>C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang</p> <p>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.</p>
<i>Aset Lainnya Rp14.544.191</i>	<p>C.4. Aset Lainnya</p> <p>Saldo Aset Lainnya Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, masing-masing adalah sebesar Rp14.544.191 dan Rp17.253.228. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.</p>

Aset Tak Berwujud
Rp129.675.000

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, masing-masing adalah sebesar Rp129.675.000 dan Rp129.675.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud pada Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian berupa Hak Cipta, Paten dan *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Januari 2023	129.675.000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Saldo Per 30 September 2023	129.675.000
Amortisasi s.d. 30 September 2023	118.038.104
Nilai Buku Per 30 September 2023	11.636.896

Aset Lain-Lain
Rp2.294.747.749

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.2.294.747.749 dan Rp. 2.169.748.749 Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Januari 2023	2.294.747.749
Mutasi tambah:	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0
Mutasi Kurang:	0
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0
Penghapusan BMN	0
Saldo Per 31 Desember 2023	2.294.747.749
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	2.291.144.560
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	3.603.189

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp-
2.409.878.558

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.-2.409.878.558 dan Rp.-2.282.170.521 Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Akumulasi Amortisasi an Penyusutan Aset
Lainnya TA 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	13.350.000	1.808.466	11.541.534
2	Paten	825.000	825.000	0
3	Software	115.500.000	115.500.000	0
	Jumlah	129.675.000	118.133.466	11.541.534
B.	Aset Lain-lain	2.294.747.749	2.291.745.092	3.002.657
	Jumlah	2.294.747.749	2.291.745.092	3.002.657
	Total	2.424.422.749	2.409.878.558	14.544.191

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka
Pendek Rp0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga Rp0

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	NIHIL	

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada *Treasury Notional Pooling (TNP)* dan belum disetorkan ke kas negara per tanggal pelaporan. Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

C.5.3. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Utang yang belum ditagihkan disebabkan karena adanya BAST/SPBy yang sampai dengan periode pelaporan belum dilakukan transaksi lanjutannya.

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

Tabel
Rincian Utang yang Belum Ditagihkan TA 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	NIHIL	
	Total	

C.5.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut

C.5.5. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.166.001.010 dan Rp10.844.163.400. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Rp10.166.001.010

Pendapatan
PNBP
Rp77.558.776

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp77.558.776 dan Rp.16.982.658 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	4.821.000	1.467.500	69.56
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana	7.950.000	3.350.000	57.86
Pendapatan layanan penelitian	4.250.000	7.500.000	-76.47
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN	55.357.776	0	100
Pendapatan lainnya	5.180.000	4.665.158	9.94
Jumlah	77.558.776	16.982.658	78.10

Pendapatan berasal dari Pendapatan sewa gedung/ bangunan , penjualan hasil pelepasan aset, sewa alat instrumen lapang dan sewa mess. Pendapatan Lain-Lain yang merupakan pengembalian belanja pegawai yang berasal dari transaksi tahun sebelumnya.

Beban
Pegawai Rp
2.475.946.120

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.475.945.120 dan Rp. 3.728.466.946 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji	1.697.330.320	2.315.662.440	-36.43
Beban Tunjangan-tunjangan	741.943.800	1.345.375.506	-81.33
Beban Lembur	36.672.000	67.429.000	-83.87
Jumlah Beban	2.475.946.120	3.728.466.946	-50.59

Beban
Persediaan
Rp141.915.900

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 141.915.900 dan Rp198.758.863. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksibaik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	0	0	0
Beban Persediaan konsumsi	141.915.900	198.758.863	-40.05
Beban persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah Beban	141.915.900	198.758.863	-40.05

Beban Barang
dan Jasa Rp
2.376.320.529

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.376.320.529 dan Rp.2.218.034.292. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan pada beban Barang dan jasa sebesar 6.66 persen disebabkan karena hamper semua kegiatan operasional kantor terlaksana secara maksimal.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	75.671.400	42.810.900	43.43
Beban Honor Output Kegiatan	79.700.000	74,760,000	6.20
Beban Barang Non Operasional Lainnya	100.407.240	44,781,400	55.40
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	11.403.400	77,480,133	-579.45
Beban Barang Operasional Lainnya	211.494.330	66,808,500	68.41
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	108.720.000	116,790,000	-7.42
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,170,000	0
Beban Jasa Pos dan Giro	354.000	1.164.000	-228.81
Beban Jasa Profesi	43.000.000	15,700,000	63.49
Beban Keperluan Perkantoran	1.304.864.725	1,301,076,597	0,29
Beban Langganan Air	24.533.100	14,135,100	42.38
Beban Langganan Listrik	237.112.136	236,156,920	0.40
Beban Langganan Telepon	116.434.453	146,357,742	-25.70
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	32.625.745	78,843,000	-141.66
Beban Jasa Konsultan	30.000.000	0	100
Jumlah	2.376.320.529	2.218.034.292	6.66

Beban
Pemeliharaan
Rp683.028.231

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 683.028.231 dan Rp. 669.804.591. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	279.109.080	236,583,735	15.25
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	403.919.151	426,423,756	-5.57
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	6.797.100	0
Jumlah Beban	683.028.231	669.804.591	1.94

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp691.266.833

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 691.266.833 dan Rp. 549.568.371. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	691.266.833	549.568.371	20.50
Jumlah Beban	691.266.833	549.568.371	20.50

Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban
Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp767.175.758

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.767.175.758 dan Rp. 979.497.919 .Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	499.186.319	698.033.680	-39.83
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	261.439.990	277.350.603	-6.09
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.840.412	3.840.412	-
Jumlah Penyusutan	764.466.721	979.224.695	-28.09
Beban Amortisasi Hak Cipta	190.724	190.724	0
Beban Amortisasi Paten	41.250	82.500	-100.00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	2.477.063	0	100.00
Jumlah Amortisasi	2.709.037	273.224	89.91
Jumlah Beban	767.175.758	979.497.919	27.68

Beban
Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Kegiatan Non
Operasional

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Penjualan Alat Kantor	55.357.776	0	100
Selisih Kurs	0	0	-
Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
Jumlah Beban	55.357.776	0	100

Pos Luar Biasa Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal
Rp10.844.163.400

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.844.163.400 dan Rp11.636.511.319.

Defisit LO
Rp-7.058.094.595

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp-7.058.094.595 dan Rp.-8.332.628.044 Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.4. Transaksi Antar Entitas

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi Aset
Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp87.508.368

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp87.508.368 dan Rp0.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	87.508.368
Jumlah	87.508.368

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp6.292,423.837

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 6.292.423.837 dan Rp. 7.534.800.405

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel
Transaksi Antar Entitas TA 2023

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	-77.558.776
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.369.982.613
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	6.292.423.837

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DEL sebesar Rp77.558.776 sedangkan DKEL sebesar Rp.6.369.982.613

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember sebesar Rp0 dari total Rp0

Ekuitas Akhir
Rp.10.166.001.010

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.166.001.010 dan Rp10.838.683.680.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 Pengungkapan Lain-lain

Sebagai tindak lanjut peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.05/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang penerbitan rekening giro, maka UPT Balitklimat TMT Januari 2013 hanya mengeluarkan satu rekening yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai Treasure Single Account (TSA) atas nama Bendahara Pengeluaran untuk keperluan menampung uang keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN.

Tahun anggaran sebelumnya (2013) dana APBN ditampung melalui Bank JABAR, sebagai langkah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku maka mulai 7 Januari 2013 rekening Bank JABAR ditutup dan dialihkan ke BRI. Untuk menampung dana penelitian yang bersumber dari mitra kerja sebelum adanya peraturan Menteri Keuangan No. 58/2013, ditampung melalui rekening BRI No.0012-01-00147130-8 yang ditatausahakan oleh BendaharaKerjasama.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen Keuangan No. 37/PB/2013 tentang sistem penggajian PNS melalui giralisasi (Bank), maka per tanggal 17 September 2013 Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi membuka rekening baru di Bank BNI 46 dengan nomor rekening 196033757. Pertimbangan membuka rekening pada bank tersebut :

1. KPPN Bogor sudah bekerjasama dengan Bank BNI 46, sehingga akan lebih mempermudah dan mempercepat pencairan dana dariBUN.
2. Adanya kemudahan dan fasilitas dari BNI 46 yang lebih baik dari Bank lain.

Untuk memenuhi peraturan yang berlaku maka rekening BRI yang digunakan untuk menampung dana dari mitra telah ditutup sejak tanggal 25 Oktober 2013, dan seluruh saldonya telah dipindahkan ke rekening BNI 46

Pejabat Pengelola Anggaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Kuasa Pengguna Anggaran	Dr. Asmarhansyah
Pejabat Pembuat Komitmen	M Nur Imansyah,S.Kom
Kasubbag Tata Usaha	Heri Wibowo, ST,M.Sc
Bendahara Pengeluaran	Sulistyawati A.Md
Bendahara Penerimaan	Dian Andriani A.Md